



PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI



TAHUN
2023

0811 7771 256



dinkes.dumaikota.go.id



dinkesdumaikota@gmail.com



KATA PENGANTAR



Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kinerjanya kepada DPRD dan masyarakat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan ini Pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2023 berarti Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menyelesaikan kegiatannya dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai kepada pemerintah Kota Dumai, DPRD dan masyarakat yang dituangkan ke dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bidang Kesehatan.

Akhir kata, diharapkan agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bidang Kesehatan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai.



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

Dr. SYAIFUL, MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710724 200112 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Visi Misi Kepala Daerah	2
C. Data Umum	3
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	9
A. Pendapatan	9
B. Belanja Daerah	10
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	11
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan.....	11
B. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	15
C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	37
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	54
A. Kegiatan DAK Fisik.....	54
B. Kegiatan DAK Non Fisik	55
BAB IV PENUTUP.....	59
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan densitas penduduk Kota Dumai tahun 2022..... 7
Tabel 2	Jumlah Tenaga 9
Tabel 3	Laporan Realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas 9
Tabel 4	Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja BLUD 10
Tabel 5	Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Kesehatan..... 10
Tabel 6	Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan 14
Tabel 7	Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 15

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Pesebaran Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023..... 8
Grafik 2	Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2015 s.d 2023..... 37
Grafik 3	Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023 38
Grafik 4	Pencapaian Angka Kematian Balita Tahun 2015 s.d 2023 38
Grafik 5	Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2015 sampai dengan 2023 Kota Dumai..... 39
Grafik 6	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023..... 41
Grafik 7	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023 41
Grafik 8	Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Kota Dumai Tahun 2023..... 42
Grafik 9	Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2023..... 44
Grafik 10	Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023 44
Grafik 11	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai Tahun 2015 s.d 2023 45
Grafik 12	Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai Tahun 2015 s.d 2023.... 45
Grafik 13	Data kasus HIV/AIDS Kota Dumai..... 46
Grafik 14	Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai Tahun 2015 s.d 2023 47
Grafik 15	Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023 47
Grafik 16	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2015 s.d 2023 49
Grafik 17	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai Tahun 2015 s.d 2023 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dumai Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun

2021-2026, berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Visi Walikota/Wakil Walikota Dumai :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

maka Dinas Kesehatan Kota Dumai menyusun Rencana Strategis untuk merealisasikan hal tersebut diatas melalui Misi yang lebih spesifik di bidang kesehatan.

Misi

Misi Pemerintah Kota Dumai yang berkaitan dengan bidang kesehatan yakni ***Misi Kedua*** :

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu”

Terkait dengan Visi dan Misi tersebut Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu SKPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan

Adapun tujuan pembangunan daerah berkaitan dengan bidang kesehatan yakni Tujuan Pertama : ***“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai”***

Sasaran

Sasaran Pembangunan Kesehatan Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Strategi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan pada tahun 2023 serta memperhatikan pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kota

Dumai, maka dalam periode 2021-2026 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas pembangunan bidang kesehatan Kota Dumai yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Adapun strategi pembangunan bidang kesehatan Kota Dumai adalah :

1. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai Standar
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
3. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan

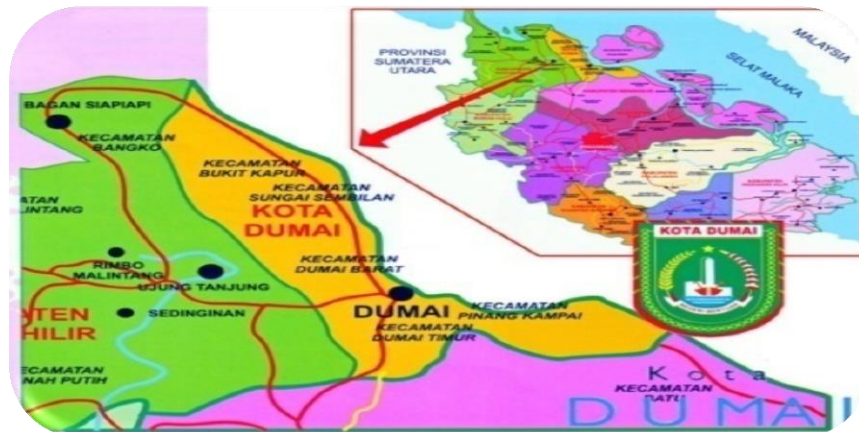
C. Data Umum

1. Data Geografis Wilayah

Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatra berhadapan dengan pulau Rupat dan Selat Malaka pada posisi antara $1^{\circ}, 23' - 1^{\circ}, 24'$ Bujur Timur dan $101^{\circ} - 23' - 27', 101^{\circ} - 28' - 13'$ Lintang Utara. Sejajar pantai terdiri dari tanah rawa bergambut dengan kedalaman 0 – 0,5 meter dan beberapa kilometer kearah selatan terdapat dataran dengan kemiringan 0 – 5% dengan luas wilayah keseluruhan 1.727,38 Km².

Adapun batas wilayah:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.



Peta Provinsi Riau

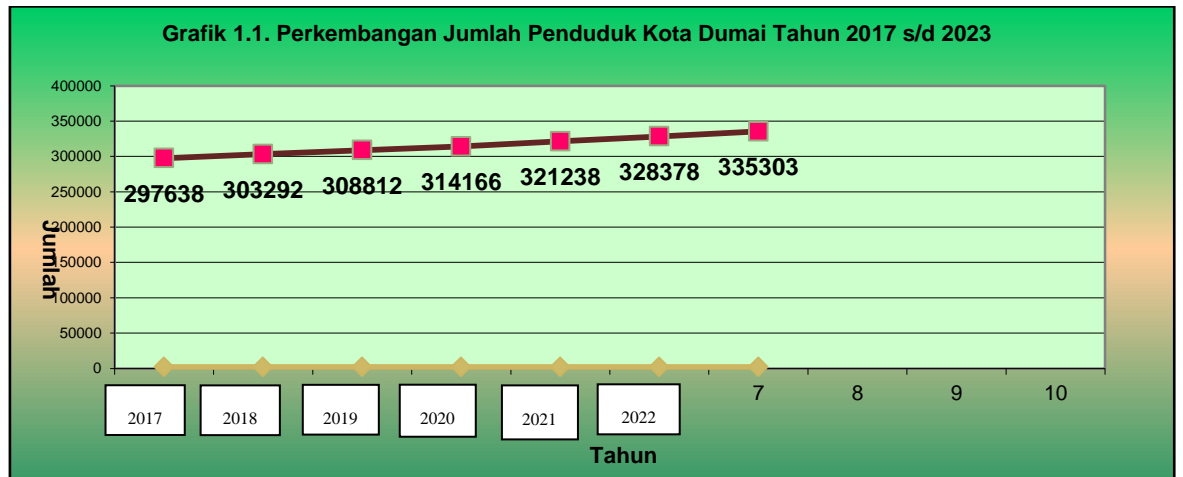
Secara geografis letak Kota Dumai sangat strategis dimana posisinya sebagai gerbang propinsi Riau bagian utara yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap negara Malaysia dan Singapura.

Iklm di Kota Dumai adalah tropis basah dengan curah hujan rata-rata antara 200-300 mm, dengan musim kemarau antara bulan Maret sampai dengan Agustus dan musim hujan antara bulan September sampai dengan Pebruari serta suhu udara rata-rata 24-33°C.

Jenis tanah di Kota Dumai umumnya terdiri organosol humus dan podsolik merah kuning yang sesuai untuk bercocok tanam dan perkebunan. Beberapa sungai besar dan kecil terdapat di Kota Dumai yang dilalui oleh sampan dan perahu. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari tanah dangkal atau sumur gali dan sumur pompa dengan kedalaman rata-rata 1-2 m maupun air tanah dalam atau sumur bor, namun pada umumnya kurang baik.

2. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai meningkat menjadi 2,17% (Data BPS, Kota Dumai Dalam Angka 2022) dan kepadatan jiwa per kilometer persegi sebesar 161,00. Angka pertumbuhan ini selanjutnya dijadikan dasar estimasi penduduk pada tahun-tahun berikutnya. Penduduk Kota Dumai berturut-turut sepuluh tahun terakhir (Tahun 2017 – 2023) menunjukkan peningkatan atau pertambahan. Penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 seperti terlihat dari grafik berikut :



Sumber: Proyeksi penduduk tahun 2010 – 2035 BPS Combine Database Pelayanan SIAK Offline Kota Dumai Tahun 2023

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Dumai yaitu sebanyak 335.303 jiwa yang menjadi acuan dalam penetapan sasaran program dan kegiatan kesehatan, dengan jumlah rumah tangga/KK sebesar 100.336 KK, rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar 3.4 jiwa dan kepadatan penduduk per km² sebesar 190.1 jiwa.

Tabel 1.1. Luas wilayah, Jumlah penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Densitas Penduduk di Kota Dumai Tahun 2023.

No	Kecamatan	Luas	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah RT	Densitas
1	Dumai Timur	47,52	2,75	72.956	21,89	21.762	1.493.1
2	Dumai Barat	44,98	2,60	45.897	13,95	13.716	998.2
3	Bukit Kapur	200,00	11,58	54.752	15,56	16.144	271.1
4	Sungai Sembilan	975,38	56,47	45.725	11,72	13.461	44.5
5	Medang Kampai	373,00	21,59	18.481	4,62	5.368	46.9
6	Dumai Kota	13,00	0,75	42.501	15,19	13.296	3.324.8
7	Dumai Selatan	73,50	4,25	54.991	17,03	16.589	737.5
	Kota Dumai	1.727,38	100	335.303	100	100.336	190.1

Sumber: Proyeksi penduduk tahun 2010 – 2035 BPS Combine Database Pelayanan SIAK Offline Kota Dumai Tahun 2023

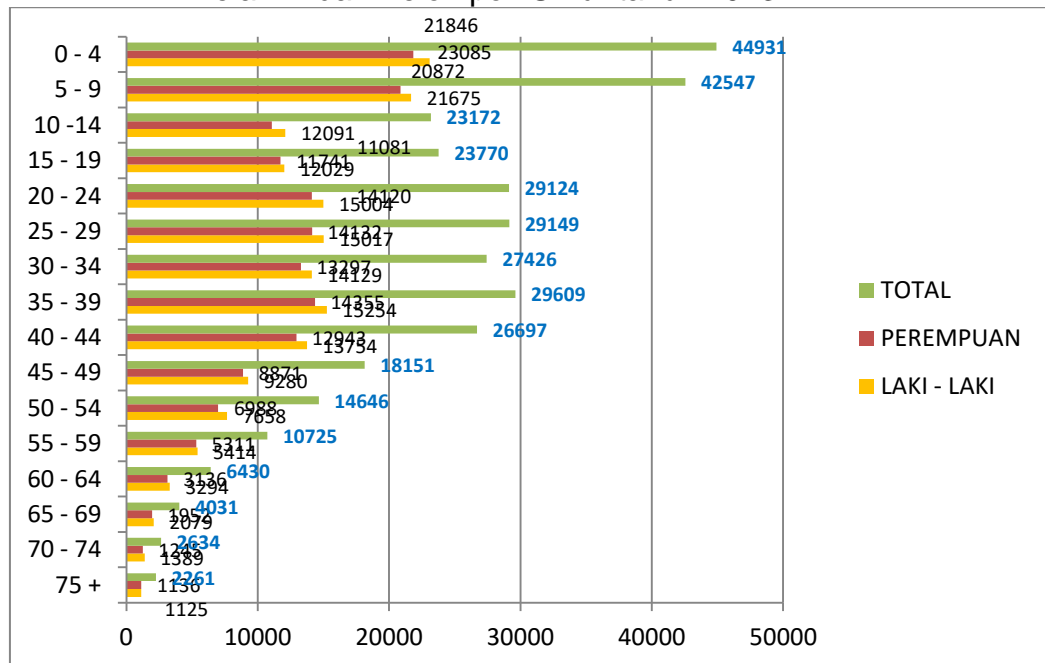
3. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Kota Dumai tidak merata, dimana Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan terpadat yang merupakan pusat kota

dengan kepadatan 3.756 jiwa per km². Sementara Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan yang penduduknya paling jarang yaitu 44.5 orang perkm².

Persebaran penduduk di Kota Dumai berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah pada kelompok usia produktif (umur 15 – 59 tahun) yaitu sebanyak 209.297 orang atau sebesar 62,42%. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif yakni penduduk usia muda (umur 0 – 14 tahun) dan penduduk usia tua (umur 65+ tahun) sebanyak 126.006 orang atau 37.58%. Sebagai akibat dari komposisi penduduk tersebut maka rasio beban tanggungan sebesar 57 per 100 penduduk usia produktif. Sedangkan persebaran penduduk di Kota Dumai menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dengan sex ratio penduduk laki-laki sebesar 105. Angka ini menunjukkan terdapat 105 laki-laki pada 100 perempuan.

Grafik 1.2 Pesebaran Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut jenis Kelamin dan Kelompok Umur tahun 2023



Sumber : Proyeksi penduduk tahun 2010 – 2035 BPS Combine Database Pelayanan SIAK Offline Kota Dumai Tahun 2023

4. Jumlah PNS

Pada Tahun 2023 jumlah tenaga kesehatan Kota Dumai yang PNS adalah sebanyak 473 orang dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PNS
1	Dinas Kesehatan	45
2	UPTD Puskesmas	473
3	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	5
4	UPTD Labkesda	8
	Jumlah	473

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

PEMERINTAH KOTA DUMAI					
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS dan UPT					
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023					
No	Uraian	Anggaran	SPJ s/d BLN INI	SISA PAGU	%
1	BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	2.224.213.000,00	2.350.364.064,03	(126.151.064,03)	105,67
2	BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	1.550.000.000,00	1.735.489.673,11	(185.489.673,11)	111,97
3	BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	1.700.000.000,00	1.834.685.709,45	(134.685.709,45)	107,92
4	BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	2.973.471.944,00	3.050.799.591,74	(77.327.647,74)	102,60
5	BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	1.296.706.000,00	1.243.322.603,94	53.383.396,06	95,88
6	BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	1.475.125.000,00	1.512.584.433,73	(37.459.433,73)	102,54
7	BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	920.000.000,00	963.694.682,01	(43.694.682,01)	104,75
8	BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	2.844.530.000,00	3.037.063.041,77	(192.533.041,77)	106,77
9	BLUD PUSKESMAS PURNAMA	1.482.588.000,00	1.455.334.436,62	27.253.563,38	98,16
10	BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	1.754.082.650,00	1.922.123.958,96	(168.041.308,96)	109,58
11	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	100.040.000,00	109.818.304,00	(9.778.304,00)	109,77
	JUMLAH	18.320.756.594,00	19.215.280.499,36	(894.523.905,36)	104,88

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

1. Belanja BLUD UPTD

PEMERINTAH KOTA DUMAI							
LAPORAN REALISASI BELANJA BLUD							
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023							
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			TOTAL	SASA PAGU	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
BLUD PUSKESMAS DUMAI KOTA	Rp 2.224.213.000,00	Rp 660.358.319,00	Rp 1.178.045.157,00	Rp 149.460.000,00	Rp 1.987.863.476,00	Rp 236.349.524,00	89,37
BLUD PUSKESMAS DUMAI BARAT	Rp 1.550.000.000,00	Rp 598.239.929,00	Rp 818.464.140,00	Rp 131.000.000,00	Rp 1.547.704.069,00	Rp 2.295.931,00	99,85
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAPUR	Rp 1.700.000.000,00	Rp 553.428.534,00	Rp 890.292.066,00	Rp 178.437.370,00	Rp 1.622.157.970,00	Rp 77.842.030,00	95,42
BLUD PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	Rp 2.973.471.944,00	Rp 1.023.905.732,00	Rp 1.665.876.855,00	Rp 268.303.693,00	Rp 2.958.086.280,00	Rp 15.385.664,00	99,48
BLUD PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	Rp 1.296.706.000,00	Rp 467.453.895,00	Rp 705.793.131,00	Rp 104.950.000,00	Rp 1.278.197.026,00	Rp 18.508.974,00	98,57
BLUD PUSKESMAS BUMI AYU	Rp 1.671.206.452,00	Rp 455.371.858,00	Rp 892.848.448,00	Rp 287.148.000,00	Rp 1.635.368.306,00	Rp 35.838.146,00	97,86
BLUD PUSKESMAS BUKIT TIMAH	Rp 920.000.000,00	Rp 318.885.164,00	Rp 478.597.286,00	Rp 95.454.200,00	Rp 892.936.650,00	Rp 27.063.350,00	97,06
BLUD PUSKESMAS JAYAMUKTI	Rp 3.150.000.000,00	Rp 1.006.647.270,00	Rp 1.741.167.409,00	Rp 297.998.500,00	Rp 3.045.813.179,00	Rp 104.186.821,00	96,69
BLUD PUSKESMAS PURNAMA	Rp 1.482.588.000,00	Rp 567.721.538,00	Rp 815.839.644,00	Rp 67.403.750,00	Rp 1.450.964.932,00	Rp 31.623.068,00	97,87
BLUD PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	Rp 1.754.082.650,00	Rp 575.242.915,00	Rp 950.663.722,00	Rp 74.514.000,00	Rp 1.600.420.637,00	Rp 153.662.013,00	91,24
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	Rp 155.809.000,00	Rp 44.530.001,00	Rp 72.660.332,00	Rp 15.312.000,00	Rp 132.502.333,00	Rp 23.306.667,00	85,04
JUMLAH	Rp 18.878.077.046,00	Rp 6.271.785.155,00	Rp 10.210.248.190,00	Rp 1.669.981.513,00	Rp 18.152.014.858,00	Rp 726.062.188,00	96,15

2. Belanja Dinas Kesehatan

REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA DINAS KESEHATAN				
No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Belanja Operasi	118.773.859.091,00	111.336.739.652,53	93,74
	Belanja Pegawai	51.786.859.624,00	49.958.586.134,00	96,47
	Belanja Barang dan Jasa	66.436.999.467,00	60.828.153.518,53	91,56
	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	100
	Belanja Modal	11.832.452.890,00	11.110.852.050,06	93,9
	Belanja Modal peralatan dan mesin	5.010.452.890,00	4.742.699.212,00	94,66
	Belanja Bangunan dan gedung	6.360.000.000,00	5.906.527.438,06	92,87
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	400.000.000,00	399.643.000,00	99,91
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	61.982.400,00	99,97
	JUMLAH	130.606.311.981,00	122.447.591.702,59	93,75

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 82.229.517.267 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 48.376.794.714 sehingga menjadi 130.606.311.981 sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Walikota No 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 No 8 Seri A tanggal 20 September 2023), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 18.320.756.594
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 894.523.905.36
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 19.215.280.499.36

2. Belanja :

1. Semula	Rp. 82.229.517.267
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.376.794.714
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 130.606.311.981
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (48.376.794.714)

1. Pendapatan Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, yakni :

• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

1. Semula	Rp. 18.320.756.594
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 894.523.905.36

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	Rp. 19.215.280.499.36
---	-----------------------

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkes pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.215.280.499.36.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a.	Belanja Operasi	
	1. Semula	81.412.909.627.00
	2. bertambah/berkurang	37.360.949.464.00
	Jumlah belanja operasi	118.773.859.091.00
b.	Belanja modal	
	1. Semula	816.607.640.00
	2. bertambah/berkurang	11.015.845.250.00
	Jumlah belanja modal	11.832.452.890.00

Belanja daerah Dinas Kesehatan Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 130.606.311.981 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 118.773.859.091 dan belanja modal sebesar Rp. 11.832.452.890.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

Table 3.1 Capaian kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian dalam (%)
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 17	11.36	100%
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 24	13.42	100%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	101	103.23	97.79%
4.	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29 – 71,33	71,67	100%
5.	Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	0.8	0.02	100%
6.	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72.00	81.81%
7.	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0,17	100%
8.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	55	195.94	-1.56%
9.	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	< 1	0.07	100%
10.	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	< 3	1.10	100%
11.	Cakupan pelayanan jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	orang	97	100.02	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

2. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Capaian kinerja seperti yang terdapat pada table berikut:

TABEL 3.1.1: PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN		URUSAN KESEHATAN										
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSAN.		DINAS KESEHATAN										
KEBIJAKAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	SATUAN TARGET DAN REALISASI	CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dumai Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829)	I	Belanja Operasi			143.477.997.605	131.615.192.812,53	91,73	%			1
		II	Belanja Modal			13.574.546.422	12.780.833.563,06	94,15	%			
		III	Belanja Tidak Terduga			-		0,00	%			
		IV	Belanja Transfer			-		0,00	%			
		Jumlah				157.052.544.027	144.396.026.375,59	91,94	%			
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			75.298.856.561	65.764.723.944,06	87,34	%			1
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	82	89,67	%	100,00					
4	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)	1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	12	12	sarana	100	21.776.302.893	20.619.366.557,06	94,69	%	

5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	1	sub kegiatan Pembangunan Puskesmas	1	1	unit	100,00	4.538.894.000	3.962.284.616,28	87,30	%				
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016.	2	sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	5	unit	100,00	1.234.624.000	1.157.546.223,54	93,76	%				
7	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	2	sub kegiatan Pengembangan Puskesmas	5	5	unit	100,00	705.000.000	702.800.000,00	99,69	%				

8	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)		3	sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	2	unit	100,00	1.611.000.000	1.578.272.900,24	97,97	%				
9	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)		3	sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4	4	unit	100,00	1.145.000.000	1.143.557.000,00	99,87	%				
10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016.		4	sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	6	unit	100,00	1.095.000.000	1.091.718.000,00	99,70	%				
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		5	sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10	10	unit	100,00	1.524.331.000	1.495.239.000,00	98,09	%				

12	Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan dan Rumah Tunggu Kelahiran Kota Dumai yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 16 Seri E)		6	sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75	75	unit	100,00	3.006.495.000	2.753.818.614,00	91,60	%					
			7	sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	272	272	unit	100,00	100.000.000	93.746.000,00	93,75	%					
			8	sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	1	1	paket	100,00	2.437.624.860	2.369.446.799,00	97,20	%					
			9	sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	3	3	paket	100,00	4.278.334.033	4.176.637.404,00	97,62	%					
			10	sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10	10	unit	100,00	100.000.000	94.300.000,00	94,30					3	
			2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	10	pkm	100,00	42.704.992.978	35.740.187.066,00	83,69	%					
			1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9590	8688	orang	90,59	274.348.900	249.260.520,00	90,86	%					
			2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9154	8319	orang	90,88	84.604.000	79.461.000,00	93,92	%					
			3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8718	8166	orang	93,67	110.157.402	109.669.100,00	99,56	%					
			4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44931	38172	orang	84,96	271.832.300	266.635.500,00	98,09	%					
			5	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	55082	41397	orang	75,16	30.887.400	30.484.400,00	98,70	%					
			6	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	209297	196643	orang	93,95	77.200.000	75.670.830,00	98,02	%					

			7	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	15356	14382	orang	93,66	82.115.500	80.390.500,00	97,90	%						
			8	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	72563	38375	orang	52,89	15.000.000	14.076.900,00	93,85	%						
			9	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	3819	3736	orang	97,83	308.970.900	294.915.000,00	95,45	%						
			10	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	498	531	orang	106,63	25.858.000	25.398.000,00	98,22	%						
			11	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	8208	14344	orang	174,76	947.422.500	410.607.387,00	43,34	%						Pembekuan Pengadaan Catridge TCM sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan No. PR.01.06/A/44079/2026 tgl 15 September 2023 tentang relokasi Catridge TCM
			12	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	9851	11368	orang	115,40	412.782.500	401.138.660,00	97,18	%						
			13	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	1	1	dokumen	100,00	1.343.212.000	1.323.896.978,00	98,56	%						
			14	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	1	dokumen	100,00	641.679.000	631.849.360,00	98,47	%						
			15	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olah Raga	1	1	dokumen	100,00	29.100.000	28.200.000,00	96,91	%						
			16	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	5	5	dokumen	100,00	1.082.502.800	1.060.117.245,00	97,93	%						
			17	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1	1	dokumen	100,00	255.291.030	249.645.200,00	97,79	%						
			18	Sub Kegiatan Pengelolaan surveilans kesehatan	1	1	dokumen	100,00	469.331.000	458.482.932,00	97,69	%						
			19	Sub Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan masalah kejiwaan	821	821	jiwa	100,00	53.800.000	50.008.500,00	92,95	%						
			20	Sub Kegiatan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	1	dokumen	100,00	1.006.015.000	971.013.247,00	96,52	%						
			21	Sub Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1	1	dokumen	100,00	26.939.377.142	24.480.143.203,00	90,87	%						Peralihan peserta BPPU dan bP Pemda Kota Dumai sebanyak 10.571 jiwa menjadi peserta PBI-JK

			22	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat	1	1	dokumen	100,00	29.999.704	25.737.300,00	85,79	%					
			23	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1	1	unit	100,00	725.300.900	693.385.989,00	95,60	%					
			24	Sub Kegiatan Pelayanan kesehatan malaria	2	2	orang	100,00	52.000.000	46.854.500,00	90,10	%					
			25	Puskesmas Medang Kampai													
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	528	478	orang	90,53	17.250.000	16.500.000,00	95,65	%					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2477	1276	orang	51,51	3.750.000	1.650.000,00	44,00	%					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3411	2134	orang	62,56	13.200.000	13.200.000,00	100,00	%					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11536	9813	orang	85,06	1.950.000	1.950.000,00	100,00	%					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26	25	orang	96,15	1.800.000	1.800.000,00	100,00	%					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	365	659	orang	180,55	8.700.000	7.125.000,00	81,90	%					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	516	356	orang	68,99	3.300.000	600.000,00	18,18	%					Titik Hotspot atau Populasi Kunci tidak banyak
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	223.290.000	30.796.134,00	13,79	%					Kegiatan PMT baru dilaksanakan di bulan Oktober 2023, di karenakan terkendalanya Juknis PMT Lokal
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	23.550.000	14.700.000,00	62,42	%					
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	16.050.000	15.900.000,00	99,07	%					
				Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	1.500.000	1.500.000,00	100,00	%					
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	79.125.000	73.500.000,00	92,89	%					
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1	1	paket	100,00	2.250.000	150.000,00	6,67	%					

			Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	laporan	100,00	135.390.000	86.768.214,00	64,09	%				
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	laporan		1.200.000	1.050.000,00	87,50	%				
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	66	46	orang		5.250.000	3.750.000,00	71,43	%				
			26 Puskesmas Dumai Kota												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1236	1212	orang	98,06	23.100.000	22.400.000,00	96,97	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5695	5360	orang	94,12	2.500.000		0,00	%	Tidak ada Balita gizi kurang/buruk yg di rujuk ke RSUD			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7094	3980	orang	56,10	36.350.000	34.650.000,00	95,32	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26529	25192	orang	94,96	14.800.000	14.800.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1947	1871	orang	96,10	13.500.000	13.500.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	65	85	orang	130,77	15.000.000	15.000.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1266	1535	orang	121,25	19.000.000	19.000.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1298	1074	orang	82,74	12.800.000	11.600.000,00	90,63	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	dokumen	100,00	367.703.000	97.242.998,00	26,45	%	Kegiatan PMT baru dilaksanakan di bulan Oktober 2023, di karenakan terkendalanya Juknis PMT Lokal			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	600.000	300.000,00	50,00	%	Tidak terealisasi untuk kegiatan Pelaksanaan gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/perusahaan karena peralihan Pj. Program dan keterbatasan waktu untuk pelaksanaan			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	16.600.000	16.600.000,00	100,00	%				

			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	5.850.000	5.850.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	18.000.000	14.250.000,00	79,17	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	7.600.000	7.600.000,00	100,00	%				
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	115.200.000	112.800.000,00	97,92	%				
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1	0	paket	0,00	2.000.000		0,00	%	Tidak ada kasus dan spesimen yang di kirim			
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	1	1	Dokumen	100,00	192.898.000	100.555.766,00	52,13	%				
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	laporan	100,00	200.000	200.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	234	138	orang	58,97	4.000.000	4.000.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	1	orang	100,00	1.000.000	1.000.000,00	100,00	%				
			27 Puskesmas Dumai Barat												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	602	591	orang	98,17	23.250.000	23.250.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2849	2123	orang	74,52	400.000	100.000,00	25,00	%	Karena Tidak ada Kasus Balita dengan Gizi Buruk yang dirujuk ke Rumah Sakit			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3821	1788	orang	46,79	31.200.000	30.200.000,00	96,79	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13269	11653	orang	87,82	3.200.000	3.200.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	973	1134	orang	116,55	4.400.000	4.400.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32	50	orang	156,25	9.300.000	9.300.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	135	87	orang	64,44	10.000.000	10.000.000,00	100,00	%				

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	988	716	orang	72,47	3.000.000	3.000.000,00	100,00	%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	261.315.000	99.610.414,00	38,12	%	Kegiatan PMT baru dilaksanakan di bulan Oktober 2023, di karenakan terkendalanya Juknis PMT Lokal					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	3.000.000	3.000.000,00	100,00	%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	14.300.000	14.300.000,00	100,00	%						
				Pengelolaan Sunveilians Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	14.100.000	6.400.000,00	45,39	%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	0	orang	0,00	1.800.000	1.700.000,00	94,44	%						
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	45.250.000	44.450.000,00	98,23	%						
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1	0	paket	0,00	300.000		0,00	%	Tidak ada kasus dan spesimen yang di kirim					
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Barat)	1	1	Dokumen	100,00	138.919.000	98.485.789,00	70,89	%						
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	laporan	100,00	400.000	400.000,00	100,00	%						
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	135	87	orang	64,44	2.300.000	2.300.000,00	100,00	%						
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	0	orang	0,00	500.000		0,00	%	Karena Tidak ada nya Kasus.					
				28 Puskesmas Bukit Kapur														
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	735	632	orang	85,99	60.500.000	25.300.000,00	41,82	%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3444	3441	orang	99,91	750.000		0,00	%	Karena tidak ada kasus Balita dengan gizi buruk yang dirujuk ke Rumah Sakit					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4495	4909	orang	109,21	10.300.000	10.200.000,00	99,03	%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16043	15681	orang	97,74	6.600.000	4.100.000,00	62,12	%						

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1178	1157	orang	98,22	14.100.000	12.150.000,00	86,17	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	37	40	orang	108,11	900.000	900.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	621	805	orang	129,63	7.400.000	6.800.000,00	91,89	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	736	393	orang	53,40	5.900.000	200.000,00	3,39	%	Titik Hotspot atau Populasi Kunci tidak banyak			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	255.445.000	32.450.738,00	12,70	%	Kegiatan PMT baru dilaksanakan di bulan Oktober 2023, di karenakan terkendalanya Juknis PMT Lokal			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	400.000	400.000,00	100,00	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	10.200.000	9.000.000,00	88,24	%				
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	9.600.000	9.150.000,00	95,31	%				
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	dokumen	100,00	9.400.000	4.300.000,00	45,74	%				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	1.500.000	1.400.000,00	93,33	%				
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	dokumen	100,00	50.750.000	48.350.000,00	95,27	%				
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1	1	paket	100,00	800.000	50.000,00	6,25	%	Tidak ada kasus dan spesimen yang di kirim			
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bukit Kapur)	1	1	dokumen	100,00	146.515.000	81.719.443,00	55,78	%				
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	laporan	100,00	1.000.000	500.000,00	50,00	%				
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	113	64	orang	56,64	3.300.000	2.800.000,00	84,85	%				
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1		orang	0,00	1.500.000		0,00	%	Karena Tidak ada nya Kasus.			

			29	Puskesmas Sungai Sembilan																
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1308	1093	orang	83,56	45.555.000	45.450.000,00	99,77	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6127	4268	orang	69,66	9.000.000	1.200.000,00	13,33	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6560	7895	orang	120,35	18.600.000	18.600.000,00	100,00	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28542	26285	orang	92,09	4.350.000	4.350.000,00	100,00	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2094	1894	orang	90,45	5.400.000	5.400.000,00	100,00	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	65	50	orang	76,92	5.400.000		0,00	%								untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tidak tercapai 100% disebabkan oleh karena salah penginputan judul kegiatan di dpa sehingga terjadi perbedaan kegiatan di dpa dan bok salur.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	682	1375	orang	201,61	33.300.000	17.850.000,00	53,60	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	764	604	orang	79,06	6.000.000	6.000.000,00	100,00	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	1	Dokumen	100,00	900.000	525.000,00	58,33	%								tidak ada bencana atau krisis kesehatan selama 2023 di wilayah kerja puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	459.915.000	49.694.393,00	10,81	%								Kegiatan PMT baru dilaksanakan di bulan Oktober 2023, di karenakan terkendalanya Juknis PMT Lokal
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	1.125.000	750.000,00	66,67	%								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	28.500.000	28.500.000,00	100,00	%								
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	26.845.000	21.675.000,00	80,74	%								
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	40.500.000	15.225.000,00	37,59	%								

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	6.600.000	6.600.000,00	100,00	%				
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	103.350.000	98.100.000,00	94,92	%				
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sungai Sembilan)	1	1	Dokumen	100,00	221.805.000	127.779.364,00	57,61	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	126	97	orang	76,98	7.500.000	1.950.000,00	26,00	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	1	orang	100,00	5.550.000	5.100.000,00	91,89	%				
			30	Puskesmas Bumi Ayu												
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1119	1091	orang	97,50	33.900.000	32.000.000,00	94,40	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5243	4506	orang	85,94	700.000	200.000,00	28,57	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5727	1675	orang	29,25	22.050.000	20.250.000,00	91,84	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24426	23772	orang	97,32	150.000	150.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1792	1514	orang	84,49	9.600.000	9.600.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	58	53	orang	91,38	2.700.000	2.000.000,00	74,07	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1164	2014	orang	173,02	11.900.000	7.600.000,00	63,87	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1824	1540	orang	84,43	9.200.000	6.900.000,00	75,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1		Dokumen	0,00	800.000	0,00	0,00	%	tidak ada bencana atau krisis kesehatan selama 2023 di wilayah kerja puskesmas			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	338.965.000	101.570.519,00	29,96	%	Kegiatan PMT baru dilaksanakan di bulan Oktober 2023, di karenakan terkendalanya Juknis PMT Lokal			

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	300.000		0,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	17.200.000	17.200.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	13.650.000	12.600.000,00	92,31	%				
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	18.700.000	11.800.000,00	63,10	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	2.400.000	2.400.000,00	100,00	%				
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	127.200.000	122.200.000,00	96,07	%				
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bumi Ayu)	1	1	Dokumen	100,00	177.264.000	119.730.290,00	67,54	%				
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Dokumen	100,00	900.000	500.000,00	55,56	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	216	116	orang	53,70	200.000	100.000,00	50,00	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	1	orang	100,00	500.000	400.000,00	80,00	%				
			31	Puskesmas Bukit Timah												
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	454	441	orang	97,14	36.830.000	36.830.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2125	1828	orang	86,02	1.800.000		0,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3013	804	orang	26,68	13.200.000	13.200.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9900	9259	orang	93,53	9.750.000	9.750.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	726	723	orang	99,59	9.000.000	9.000.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24	25	orang	104,17	5.400.000	5.400.000,00	100,00	%				

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	463	1355	orang	292,66	3.750.000	3.750.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	595	436	orang	73,28	6.300.000	6.300.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	198.695.000	90.777.496,00	45,69	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	3.600.000	3.600.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	10.800.000	10.800.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	5.700.000	5.250.000,00	92,11	%				
				Pengelolaan Sunveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	8.850.000	8.550.000,00	96,61	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	1.950.000	1.950.000,00	100,00	%				
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	57.600.000	57.225.000,00	99,35	%				
				Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dokumen	100,00	131.692.000	101.433.873,00	77,02	%				
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Dokumen	100,00	225.000	225.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	86	56	Dokumen	65,12	3.750.000	3.750.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	0	orang	0,00	1.500.000	1.500.000,00	100,00	%				
				32 Puskesmas Purnama												
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	705	625	orang	88,65	57.075.000	40.288.125,00	70,59	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4339	1334	orang	30,74	29.550.000	17.750.000,00	60,07	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15380	13350	orang	86,80	2.300.000	2.300.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1129	1117	orang	98,94	7.900.000	7.900.000,00	100,00	%				

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	37	40	orang	108,11	3.400.000	3.400.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	455	2361	orang	518,90	2.200.000	2.200.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	696	583	orang	83,76	20.000.000	5.000.000,00	25,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	305.275.000	68.620.919,00	22,48	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	9.900.000	5.400.000,00	54,55	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	7.600.000	6.900.000,00	90,79	%				
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	10.200.000	3.200.000,00	31,37	%				
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	33.800.000	22.850.000,00	67,60	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	1.500.000	1.350.000,00	90,00	%				
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	44.150.000	39.400.000,00	89,24	%				
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1	1	Dokumen	100,00	950.000		0,00	%	Tidak ada kasus dan spesimen yang di kirim			
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Purnama)	1	1	Dokumen	100,00	161.570.000	76.301.083,00	47,22	%				
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1		Dokumen	0,00	350.000		0,00	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	84	60	orang	71,43	2.000.000	2.000.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	0	orang	0,00	4.400.000	3.900.000,00	88,64	%				
			33	Puskesmas Jaya Mukti												
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2087	1698	orang	81,36	17.000.000	15.100.000,00	88,82	%				

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11614	10867	orang	93,57	21.500.000	16.500.000,00	76,74	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45539	45539	orang	100,00	1.600.000	1.000.000,00	62,50	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3341	2828	orang	84,65	36.000.000	26.550.000,00	73,75	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	109	132	orang	121,10	2.500.000	1.900.000,00	76,00	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2075	1734	orang	83,57	24.500.000	4.600.000,00	18,78	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1391	1077	orang	77,43	5.800.000	2.600.000,00	44,83	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	543.420.000	33.061.194,00	6,08	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	19.200.000	14.200.000,00	73,96	%				
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	900.000	900.000,00	100,00	%				
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	39.250.000	28.300.000,00	72,10	%				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	1	orang	100,00	6.400.000	1.900.000,00	29,69	%				
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	176.550.000	143.900.000,00	81,51	%				
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1	1	Dokumen	100,00	1.600.000		0,00	%	Tidak ada kasus dan spesimen yang di kirim			
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Jaya Mukti)	1	1	Dokumen	100,00	236.186.000	82.068.925,00	34,75	%				
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	0	Dokumen	0,00	1.000.000		0,00	%				
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	373	200	orang	53,62	4.000.000	2.900.000,00	72,50	%				

			34	Puskesmas Bukit Kayu Kapur															
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	831	827	orang	99,52	26.030.000	25.130.000,00	96,54	%							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3893	3651	orang	93,78	7.575.000	7.575.000,00	100,00								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5009	6011	orang	120,00	5.700.000	5.700.000,00	100,00								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18133	16099	orang	88,78	5.400.000	5.400.000,00	100,00								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1330	1310	orang	98,50	37.500.000	29.100.000,00	77,60								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	42	36	orang	85,71	3.600.000	3.300.000,00	91,67								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	404	815	orang	201,73	14.100.000	14.100.000,00	100,00								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	928	650	orang	70,04	8.400.000	8.400.000,00	100,00								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dokumen	100,00	311.855.000	57.615.135,00	18,47								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	Dokumen	100,00	7.200.000	750.000,00	10,42								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dokumen	100,00	18.300.000	15.150.000,00	82,79								
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	300.000	300.000,00	100,00								
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	17.250.000	11.925.000,00	69,13								
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	0	orang	0,00	600.000	600.000,00	100,00								
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dokumen	100,00	59.700.000	50.250.000,00	84,17								
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1	1	Dokumen	100,00	5.250.000	450.000,00	8,57			Tidak ada kasus dan spesimen yang di kirim					
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bukit Kayu Kapur)	1	1	Dokumen	100,00	163.253.000	103.214.003,00	63,22								

			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	0	Dokumen	0,00	300.000		0,00					
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	85	50	orang	58,82	3.000.000	2.550.000,00	85,00					
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	0	orang	0,00	450.000		0,00					
		3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	11	11	sarana	100,00	199.715.590	186.304.047,00	93,28	%				
			1 Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8	8	dokumen	100,00	177.829.300	164.654.047,00						
			2 Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1	1	unit	100,00	21.886.290	21.650.000,00	98,92	%				
		4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102	102	sarana	100,00	10.617.845.100	9.218.866.274,00	86,82	%				
			1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	14	14	unit	100,00	36.424.000	35.970.000,00	98,75	%				
			2 Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75	75	unit	100,00	83.493.400	79.838.800,00	95,62	%				
			3 Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	11	11	unit	100,00	10.473.627.700	9.090.457.474,00	86,79	%				
			4 Sub Kegiatan Penyiapan, Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2	2	Dokumen	100,00	24.300.000	12.600.000,00	51,85	%	Tidak realisasi 1 (satu) Kegiatan yaitu kunjungan dokter spesialis karena tidak terpenuhinya penjadwalan dokter spesialis untuk kunjungan, karena banyaknya kunjungan rawat jalan dan ada Co-Ass yang akan melakukan studi kasus			

	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN																	
		Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	83	83	%	100,00	864.829.200	818.758.053,00	94,67	%									
	1	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	25	25	tempat	100,00	84.500.000	84.032.400,00	99,45	%									
	1	Sub Kegiatan Pengendalian perizinan praktyek tenaga kesehatan	1	1	Dokumen	100,00	84.500.000	84.032.400,00	99,45	%									
	2	Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota	9	9	kegiatan	100,00	650.600.800	610.033.173,00	93,76	%									
	1	Sub Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota	9	9	kegiatan	100,00	650.600.800	610.033.173,00	93,76	%									
	2	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10	10	puskesmas	100,00	129.728.400	124.692.480,00	96,12	%									
	1	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2	2	Dokumen	100,00	129.728.400	124.692.480,00	96,12	%									
	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																	
		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	79	78	%	98,67	964.820.492	910.412.127,00	94,36	%									
	1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	155	155	sarana	100,00	283.860.000	260.862.000,00	91,90	%									
	1	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	3	3	Dokumen	100,00	283.860.000	260.862.000,00	91,90	%									

				Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50	50	sarana	100,00	152.595.000	151.745.676,00	99,44	%				
			1	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1	1	Dokumen	100,00	152.595.000	151.745.676,00	99,44	%				
				Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4	4	Dokumen	100,00	190.485.892	185.838.166,00	97,56	%				
			1	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	4	4	Dokumen	100,00	190.485.892	185.838.166,00	97,56	%				
				Kegiatan Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	1	Dokumen	100,00	96.234.600	93.743.285,00	97,41	%				
			1	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1	1	Dokumen	100,00	96.234.600	93.743.285,00	97,41	%				
				Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1	1	Dokumen	100,00	241.645.000	218.223.000,00	90,31	%				
			1	Sub Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	30	30	unit	100,00	241.645.000	218.223.000,00	90,31	%				

	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																	
		Indikator Program: Rasio posyandu per 1000 balita	4,68	4	per 1000 balita	94,23		1.716.066.700	1.674.956.639,00	97,60	%								
	1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20	20	kelurahan	100,00		891.839.500	880.009.400,00	98,67	%								
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	6	Dokumen	100,00		891.839.500	880.009.400,00	98,67	%								
	2	Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kab/kota	34439	36674	RT	106,49		174.998.400	170.576.350,00	97,47	%								
	1	sub kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	34439	36674	RT	106,49		174.998.400	170.576.350,00	97,47	%								
	2	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198	198	posyandu	100,00		649.228.800	624.370.889,00	96,17	%								
	1	Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	3	3	Dokumen	100,00		517.278.800	511.095.889,00	98,80	%								
	2	Puskesmas Medang kampai																	
		Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00		9.000.000	5.175.000,00	57,50	%								
	3	Puskesmas Dumai Kota																	
		Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00		20.350.000	18.850.000,00	92,63	%								
	4	Puskesmas Bukit Kapur																	
		Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00		13.100.000	9.800.000,00	74,81	%								

			5	Puskesmas Sungai Sembilan														
				Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00	35.625.000	30.975.000,00	86,95	%						
			6	Puskesmas Bumi Ayu														
				Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00	9.700.000	9.700.000,00	100,00	%						
			7	Puskesmas Bukit Timah														
				Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00	12.975.000	12.975.000,00	100,00	%						
			8	Puskesmas Jaya Mukti														
				Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00	15.000.000	15.000.000,00	100,00	%						
			9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur														
				Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	1	1	Dokumen	100,00	16.200.000	10.800.000,00	66,67	%						
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA															
			Indikator Program: Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota		100	100	%	100,00	78.207.971.074	75.227.175.612,53	96,19	%						
			1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	28	Dokumen	100,00	95.158.206	92.837.800,00	97,56	%						
			1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	7	7	dokumen	100,00	49.007.856	48.007.550,00	97,96	%						
			2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	dokumen	100,00	1.503.600	1.503.600,00	100,00	%						
			3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	dokumen	100,00	1.503.600	1.503.600,00	100,00	%						

			4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	dokumen	100,00	1.809.850	1.809.850,00	100,00	%				
			5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	2	dokumen	100,00	1.809.850	1.809.850,00	100,00	%				
			6	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	laporan	100,00	16.708.950	16.708.950,00	100,00	%				
			7	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	9	9	laporan	100,00	22.814.500	21.494.400,00	94,21	%				
			2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	2	laporan	100,00	51.474.529.624	49.643.198.634,00	96,44	%				
			1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	456	456	orang	100,00	51.383.229.624	49.558.986.134,00	96,45	%				
			2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	2	2	laporan	100,00	91.300.000	84.212.500,00	92,24	%				
			3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	4	Dokumen	100,00	28.400.000	27.800.000,00	97,89	%				
			1	Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	2	Dokumen	100,00	13.400.000	13.400.000,00	100,00	%				
			2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	2	Dokumen	100,00	15.000.000	14.400.000,00	96,00	%				
			4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	456	456	orang	100,00	323.313.366	312.701.214,00	96,72	%				
			1	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	1	Dokumen	100,00	158.453.270	150.075.000,00	94,71	%				
			2	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	9	9	orang	100,00	164.860.096	162.626.214,00	98,64	%				
			5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	bulan	100,00	1.395.318.832	1.322.453.634,00	94,78	%				
			1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	1	paket	100,00	39.564.100	35.447.700,00	89,60	%				
			2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	3	paket	100,00	390.587.400	348.381.700,00	89,19	%				
			3	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	3	3	paket	100,00	34.851.200	30.779.000,00	88,32	%				
			4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	2	2	paket	100,00	139.186.500	132.833.500,00	95,44	%				

			5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3	3	paket	100,00	149.824.632	143.693.250,00	95,91	%				
			6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	1	Dokumen	100,00	3.052.000	2.340.000,00	76,67	%				
			7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	laporan	100,00	590.137.000	582.599.320,00	98,72	%				
			8	Sub Kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1	1	Dokumen	100,00	48.116.000	46.379.164,00	96,39	%				
			6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	bulan	100,00	828.503.500	817.095.000,00	98,62	%				
			1	Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	1	unit	100,00	125.208.000	125.160.000,00	99,96	%				
			2	Sub kegiatan pengadaan mebel	25	25	unit	100,00	149.196.000	146.995.000,00	98,52	%				
			3	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12	12	unit	100,00	554.099.500	544.940.000,00	98,35	%				
			7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	bulan	100,00	3.267.870.000	3.040.131.502,00	93,03	%				
			1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1	laporan	100,00	445.600.000	338.352.752,00	75,93	%				
			2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	laporan	100,00	619.970.000	606.978.750,00	97,90	%				
			3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	1	laporan	100,00	2.202.300.000	2.094.800.000,00	95,12	%				
			8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	18	unit	100,00	1.916.800.500	1.818.942.970,53	94,89	%				
			1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	17	17	unit	100,00	741.800.500	646.413.369,00	87,14	%				
			2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	unit	100,00	1.175.000.000	1.172.529.601,53	99,79	%				

		9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	1	1	Dokumen	100,00	18.878.077.046	18.152.014.858,00	96,15	%				
		1	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kapur	12	12	bulan	100,00	1.700.000.000	1.622.157.970,00	95,42	%				
		2	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kayu Kapur	12	12	bulan	100,00	1.754.082.650	1.600.420.637,00	91,24	%				
		3	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Timah	12	12	bulan	100,00	920.000.000	892.936.650,00	97,06	%				
		4	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bumi Ayu	12	12	bulan	100,00	1.671.206.452	1.635.368.306,00	97,86	%				
		5	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Barat	12	12	bulan	100,00	1.550.000.000	1.547.704.069,00	99,85	%				
		6	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Kota	12	12	bulan	100,00	2.224.213.000	1.987.863.476,00	89,37	%				
		7	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jaya Mukti	12	12	bulan	100,00	3.150.000.000	3.045.813.179,00	96,69	%				
		8	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Medang Kampai	12	12	bulan	100,00	1.296.706.000	1.278.197.026,00	98,57	%				
		9	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Purnama	12	12	bulan	100,00	1.482.588.000	1.450.964.932,00	97,87	%				
		10	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sungai Sembilan	12	12	bulan	100,00	2.973.471.944	2.958.086.280,00	99,48	%				
		11	Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan	12	12	bulan	100,00	155.809.000	132.502.333,00	85,04	%				

3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Sasaran 1.1 : Menurunnya Mortalitas (angka kematian)

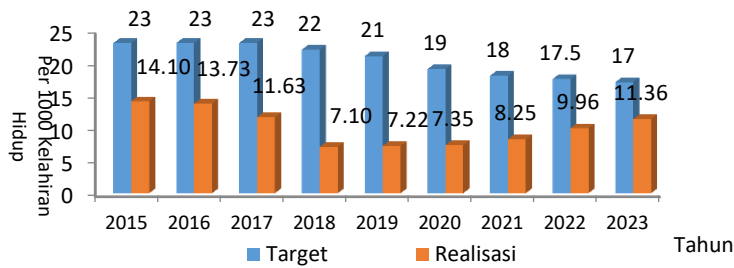
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 17	11.36	100%
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 24	13.42	100%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	101	103.23	97.79%
4.	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29-71.33	71.67	100%

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 1 yakni Terkendalinya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2023 adalah sebesar 99.45%.

a. Angka Kematian Bayi

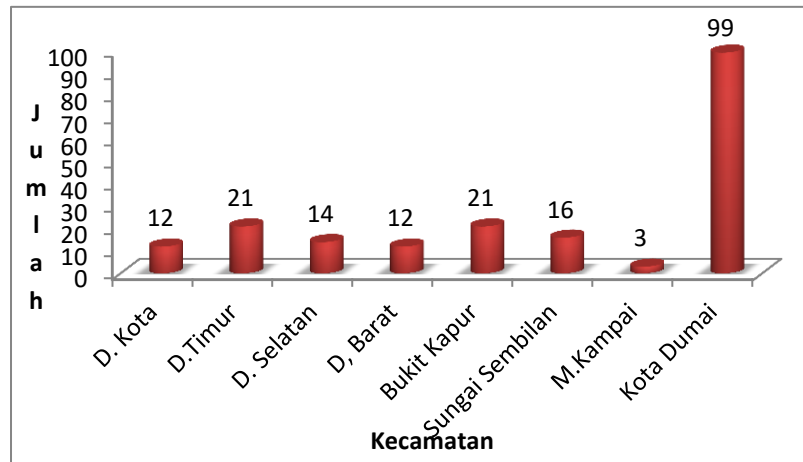
Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 99 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11.36 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian bayi sebesar 9.96 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2015 sampai dengan 2023 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.1 berikut ini :

Grafik 4.1
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai
Dari Tahun 2015 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur dan Bukit Kapur yakni sebanyak 21 kasus, disusul dengan kecamatan sungai sembilan sebanyak 16 kasus dan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 14 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.2 berikut ini :

Grafik 4.2
Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai tahun 2023



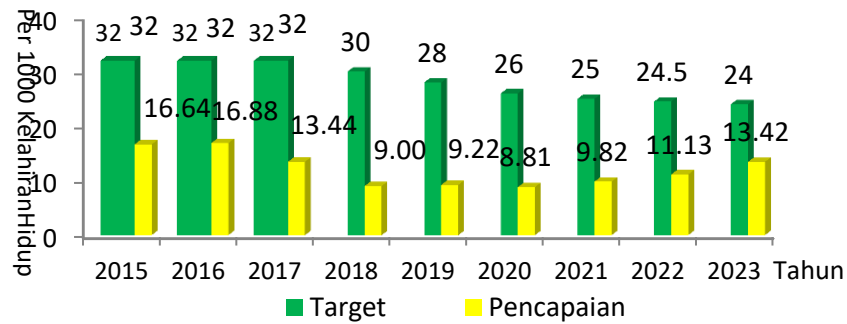
Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus BBLR, Aspeksia dan Penyebab Lain.

b. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 117 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 13.42 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian

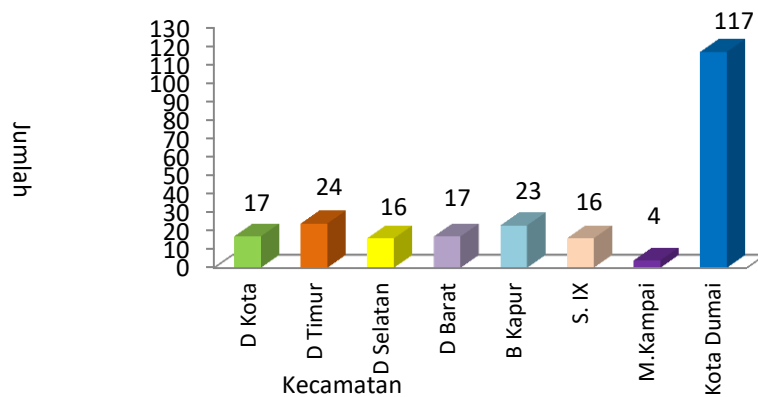
tahun 2022 dimana angka kematian bayi sebesar 11.13 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 24 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2015 sampai dengan 2023 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.3 berikut ini :

Grafik 4.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
Dari Tahun 2015 sampai dengan 2023



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 24 kasus dan Bukit Kapur yakni sebanyak 23 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.4 berikut ini :

Grafik 4.4
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023

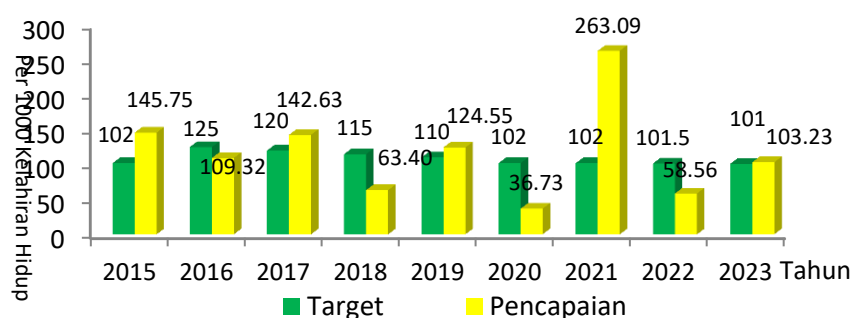


Penyebab kematian balita masih didominasi oleh BBLR, Asfiksia dan Penyebab lain.

c. Angka Kematian Ibu

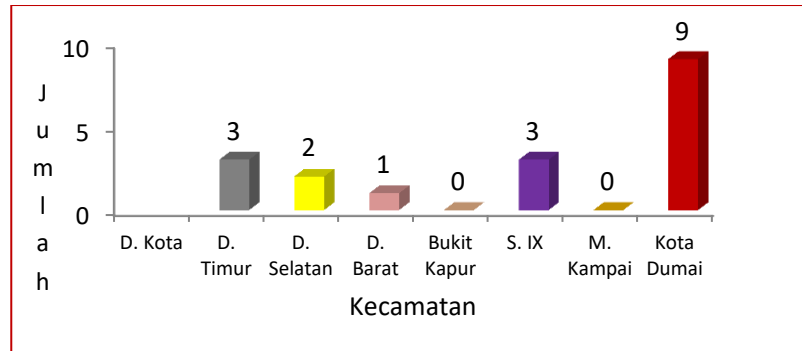
Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 9 kasus dari 8.538 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 103.23, target kinerja angka kematian ibu tahun 2023 adalah 101 per 100.000 kelahiran hidup sehingga persentase kinerja adalah 97,79% yang berarti pencapaian indikator angka kematian ibu sangat tinggi dengan capaian indikator sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, di mana angka kematian ibu sebesar 58.56 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 101 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini melebihi target namun bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 194 per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2015 sampai dengan 2023 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 4.5 berikut ini :

Grafik 4.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai
Dari Tahun 2015 sampai dengan 2023



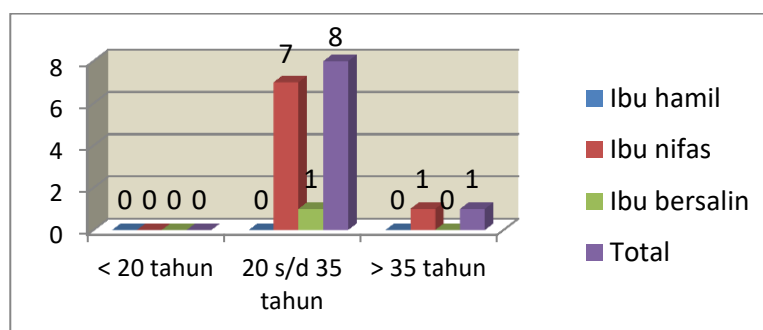
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terdapat di 4 Kecamatan sebanyak 9 kasus, seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut ini :

Grafik 4.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena pendarahan sebanyak 4 kasus dan gangguan hipertensi sebanyak 3 kasus serta lain-lain sebanyak 1 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-34 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terdapat pada kelompok ibu nifas sebanyak 5 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4.7
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu
Dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023



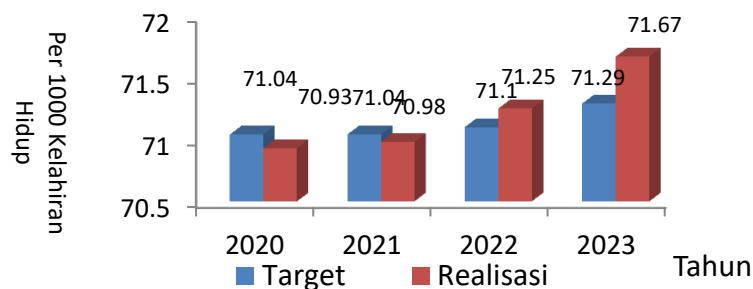
d. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Mulai tahun 2018 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan menggunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah

dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2023 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 71.67 tahun. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 yakni sebesar 71.25 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2023 dapat di lihat pada grafik 4.8 berikut ini :

Grafik 4.8
Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai Tahun 2020 s.d 2023



Tabel 4.3
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2023

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2014	70,59	70,76	70,05
2.	2015	70,78	70,93	70,25
3.	2016	70,90	70,97	70,31
4.	2017	71,06	70,99	70,37
5.	2018	71,20	71,19	70,55
6.	2019	71.38	71.48	70,82
7.	2020	71.47	71.60	70.93
8.	2021	71.57	71.67	70.98
9.	2022	71.85	71.95	71.25
10.	2023	73.93	72.24	71.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2023 (AHH," Life Expectancy of Population")

Sasaran 1.2 : Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	0.8	0,02	100%
2.	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72.0	81.82%
3.	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0.18	100%
4.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	55	195.94	-160.06%

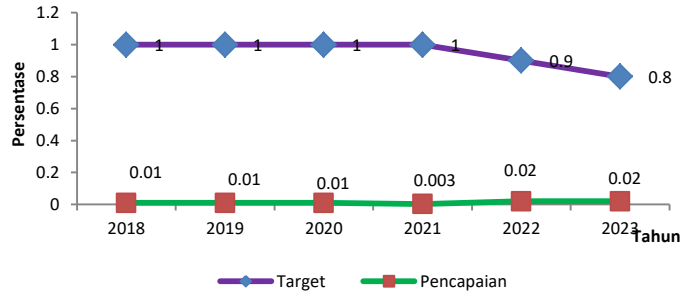
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 2 yakni menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2023 adalah sebesar 30.44%.

a. Angka Kesakitan Malaria

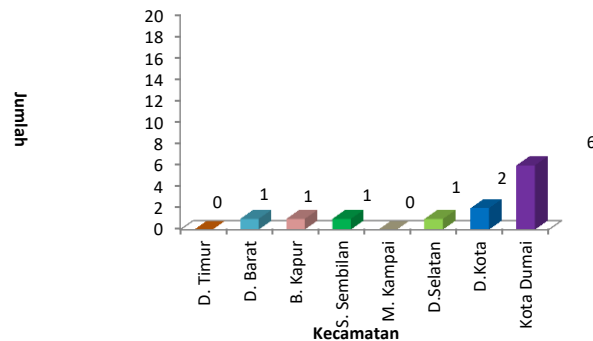
Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 155 kasus malaria klinis. Dari 155 kasus yang ada terdapat 6 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,02 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,02 per 1.000 penduduk, terlihat tidak ada peningkatan pencapaian . Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 0.8 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik 4.9 dibawah ini :

Grafik 4.9
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2018 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terdapat pada puskesmas dumai kota sebanyak 2 kasus seperti terlihat pada grafik 4.10 berikut ini :

Grafik 4.10
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023

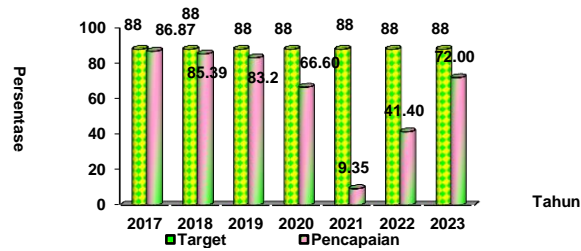


b. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2023 dari total 450 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 324 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 72.0%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 sebesar 41.4%, maka terlihat ada peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2023 belum mencapai target. Pencapaian

angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2015 sampai dengan 2023 dapat dilihat dari grafik 4.11 berikut ini :

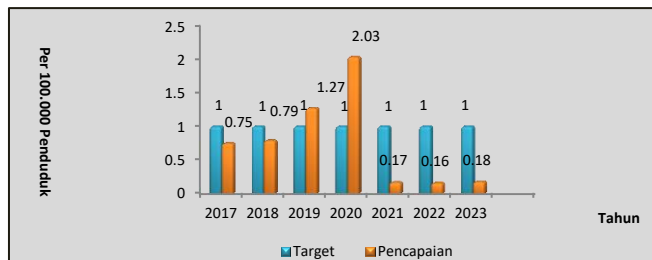
Grafik 4.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan 2023



c. Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 594 kasus yang terdiri dari 547 kasus lama dan 47 kasus baru yang ditemukan tahun 2023. Dari 594 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 121 kasus, Lost Follow Up (LFU) sebanyak 98 kasus (hilang kontak) dan sebanyak 8 kasus berhenti minum obat ARV. sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 367 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2023 adalah sebesar 0.18% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 209.297 orang).

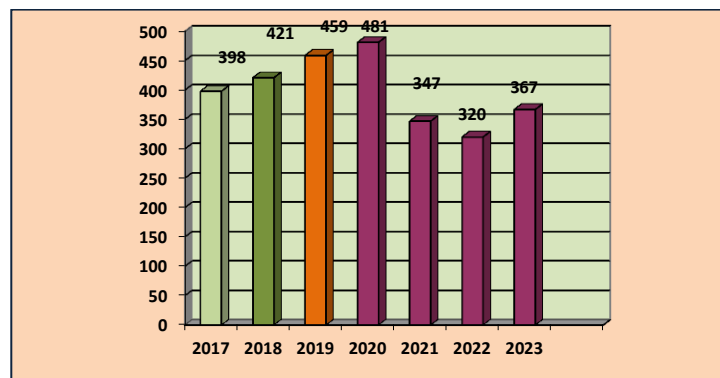
Grafik 4.12
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan 2023



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0.16%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2023. Bila dibandingkan

dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar $< 1\%$, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

Grafik 4.13
Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai
Dari Tahun 2017 s/d 2023

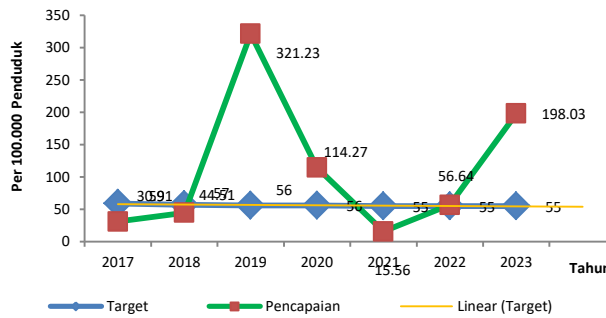


d. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2023 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 664 kasus atau IR = 198.03 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 9 orang atau CFR = 1.37%,. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 186 kasus atau IR = 56.64 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 0 kasus atau CFR = 0%, maka ada peningkatan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 55 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut meningkat dan di atas target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang). Angka kesakitan DBD disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor

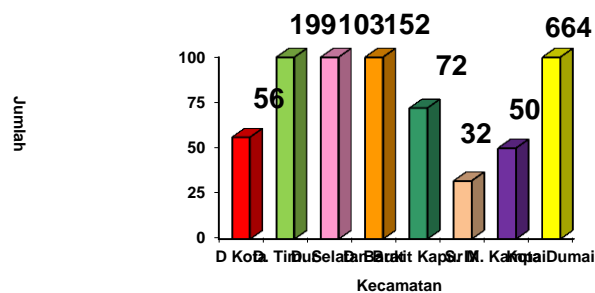
DBD seperti $\pm 80\%$ penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Grafik 4.14
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 199 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Barat 151 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.15 berikut ini :

Grafik 4.15
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 77 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

Sasaran 1.3 : Meningkatnya Status Gizi Balita

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	< 1	0,07	100%
2.	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	< 3	1.10	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

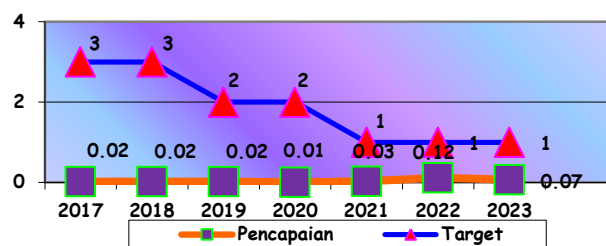
Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 3 yakni meningkatnya status gizi pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

a. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar

deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2023 ditemukan 13 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti 3 kasus, Bumi Ayu 3 kasus, Purnama 2 kasus, Bukit Kapur 2 kasus, dan sungai sembilan 3 kasus. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2023 adalah 0,07%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 23 kasus, maka ada penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 4.16
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan 2023



Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervensi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

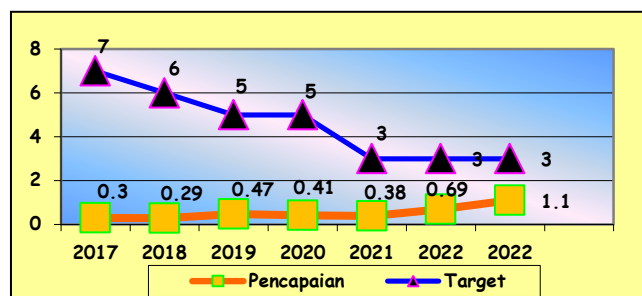
Dari 13 balita gizi buruk yang diintervensi sampai akhir tahun 2023 tinggal 4 (empat) balita yang masih berstatus gizi buruk dikarenakan balita mengalami

penyakit penyerta yang mana penyakit tersebut harus disembuhkan terlebih dahulu.

b. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2023 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 212 kasus dari 19.267 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 1.10%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 133 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,69%, terlihat ada peningkatan kasus balita dengan gizi kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 4.17
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2017 sampai dengan 2023



Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2023 ditemukan 212 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan

intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 92 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pada akhir tahun 2023 jumlah kasus balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 120 kasus. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi

Sasaran 2.1 : Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97	100	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran 2.1 yakni Cakupan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai

Program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak Tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi Masyarakat Kota Dumai Tahun 2018. Kegiatan yang dilakukan antara lain melaksanakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas, pembinaan

pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Sampai dengan Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 213.513 orang, dan Non PBI (Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah/Mandiri dan Bukan Pekerja) ada sebanyak 124.618 orang sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 338.131 dari 338.064 orang penduduk Kota Dumai berdasarkan Data Agregat kependudukan (DAK) semester I Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Dengan demikian pencapaian cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 100% dan persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan)

Tabel 4.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2020 – 2023

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan			
		2020	2021	2022	2023
Penerima Bantuan Iuran (PBI)					
1	PBI APBN	74,766	75,857	85.175	103.498
2	PBI APBD	84,057	89,238	108.456	110.015
Sub Jumlah PBI		158,823	165,095	193.631	213.513
Non PBI					
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	82,728	86,623	94.250	97.128
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	26,429	26,350	26.479	22.846
3	Bukan Pekerja (BP)	702	3,188	3.159	4.644
Sub Jumlah Non PBI		109,859	116,161	123.888	124.618
Total Peserta Kota Dumai		268,682	281,256	317.519	338.131
Jumlah Penduduk Kota Dumai		314,166	321,238	331.445	338.064
% JKN di Kota Dumai		85.52	87.55	95.80	100.02
% JKN PBI		50.55	51.39	58.42	63.16

Berdasarkan jenis kepesertaan JKN jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 63,14% lebih banyak jumlahnya dari pada non PBI (36,86%). Hal ini menunjukkan beban Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Dumai masih besar dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 317.519 orang atau sebesar 95,80%, maka jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan pada Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 97%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai pada tahun 2023.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

A. KEGIATAN DAK FISIK

1. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Dumai mendapatkan alokasi DAK Fisik Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp. 1.846.505.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan nilai yang terkontrak sebesar Rp. 1.634.654.012,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah) sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2023. Adapun realisasi keuangan dan fisik sesuai dengan menu adalah sebagai berikut :

Menu DAK	Vol	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
Peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2					
Prasarana	1 paket	354.131.000,-	348.131.000,-	98,31	100
Alat Laboratorium	1 paket	1.492.374.000,-	1.286.523.012,-	86,21	100
TOTAL		1.846.505.000,-	1.634.654.012,-	88,53	100

Realisasi Fisik DAK Fisik Reguler Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan pada TA 2023 ini sudah mencapai 100%, dengan realisasi keuangan mencapai 88.53% Sehingga pada tahun 2023 ini terdapat beberapa outcome tambahan yaitu :

- a) Terdapat pengadaan generator set dan UPS untuk Laboratorium Kesehatan Daerah dalam keadaan baik.
- b) Terdapat pengadaan alat laboratorium kesehatan sebanyak 1 paket dalam keadaan baik

2. Subb Bidang Pengendalian Penyakit

Alokasi DAK Fisik Subbidang Pengendalian Penyakit TA 2023 sebanyak Rp. 299.850.000,- dengan rincian realisasi per menu sebagai berikut :

Menu DAK Bid Kesehatan	Volume	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
Pengadaan Sanitarian Kit	3 paket	299.850.000	299.850.000	100	100
TOTAL		299.850.000	299.850.000	100	100

Pengadaan Sanitarian Kit seluruhnya menggunakan mekanisme e-purchasing, adapun peruntukannya adalah untuk puskesmas Purnama, Dumai Barat dan Bukit Kayu Kapur

B. KEGIATAN DAK NON FISIK

1. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Dana BOK melalui DAK Non Fisik TA 2023 ini seluruhnya dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Puskesmas dan dimanfaatkan oleh Puskesmas. Adapun Capaian Program sesuai standar Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai periode s/d Desember 2023, sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan SKPD	(%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.59
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90.88
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95.65
4	Pelayanan Kesehatan Balita	85.22
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	75.16
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	94.10
7	Pelayanan Kesehatan Penderita Usia lanjut	93.66
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52.89
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	97.83
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	106.63

11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	174.71
12	Pelayanan daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	115.40

i. **REALISASI KEUANGAN**

Adapun realisasi keuangan Dana BOK TA 2023 kami rinci sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2023											
No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan					Permasalahan Kodefikasi Masalah	
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu Alokasi	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis	Kodefikasi Masalah		
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)				%
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
I	BOK - Kabupaten/Kota			4.554.089.900			3.709.710.495	81,46			
A	UKM Esensial Sekunder			1.075.409.000			1.009.742.580	93,89			
1	Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat			351.534.000			323.159.320	91,93			8 (melalui mekanisme GU)
	Surveilans dan Tata Laksana Kesehatan Ibu dan Anak			60.475.000			60.254.800	99,64			
	Pendampingan puskesmas dan FKTP dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal			65.520.000			65.520.000	100,00			
	Transport Rujukan Pelayanan Ibu Melahirkan			2.250.000				0,00			
	Tempat Tunggu Kelahiran (ITK)			94.920.000			69.771.720	73,51			
	Penguatan Posyandu dan UKBM lainnya			128.369.000			127.612.800	99,41			
2	Upaya Deteksi dini, preventif dan respons penyakit			590.975.000			561.524.760	95,02			8 (melalui mekanisme GU)
	Penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus, rumor, penanggulangan dan surveilans penyakit dan penyehatan lingkungan berpotensi KLB serta penyakit menular lainnya			73.050.000			73.050.000	100,00			
	Surveilans aktif Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya			40.950.000			40.950.000	100,00			
	Biaya pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK)			138.075.000			110.174.760	79,79			
	Pendampingan dan bimbingan teknis program pencegahan dan pengendalian penyakit prioritas nasional serta penyehatan lingkungan di puskesmas			254.700.000			254.250.000	99,82			
	Pertemuan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK Terintegrasi			84.200.000			83.100.000	98,69			
3	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			132.900.000			125.058.500	94,10			8 (melalui mekanisme GU)
	Pembinaan Pelaksanaan dan Penggerakan Masyarakat			132.900.000			125.058.500	94,10			

B	Kefarmasian dan BMHP			2.080.358.000		1.430.260.952	68,75		
	Pengadaan BMHP di Kab/Kota			941.258.000		849.282.452	90,23		
	Pengadaan BMHP Sricing kehamilan, glukoprotein, kolesterol			163.233.350		163.224.512	99,99		
	Pengadaan BMHP Sricing PTM			778.024.650		686.057.940	88,18		
	Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat			20.075.000		16.600.000	82,69		
	Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat			20.075.000		16.600.000	82,69		
	BHP P2P			1.119.025.000		564.378.500	50,43		
	Pengadaan rapid HIV dan reagen sifilis untuk skrining HIV dan sifilis pada bumil			120.000.000		109.875.000	91,56		
	Pengadaan kartrid TCM			525.416.000			0,00		
	Pengadaan RDT Malaria			52.000.000		46.854.500	90,10		
	Pengadaan reagen strip gula darah			278.221.000		264.275.000	94,99		
	Pengadaan Reagen Surveilans air minum			143.388.000		143.374.000	99,99		
C	Akreditasi FKTP			401.584.000		314.270.500	78,26		
	Peningkatan Mutu FKTP dan Akreditasi Puskesmas			401.584.000		314.270.500	78,26		
	Survey Akreditasi Puskesmas			401.584.000		314.270.500	78,26		
D	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Topik Prioritas			996.738.900		955.436.463	95,86		
	Pelatihan Tenaga Kesehatan/Petugas Puskesmas sesuai layanan klaster siklus hidup			650.608.900		614.733.174	94,49		
	Pelatihan pelayanan klaster Ibu Hamil, Balita dan Remaja			36.000.000		36.000.000	100,00		
	Pelatihan pelayanan klaster Usia Produktif dan Lansia			107.798.000		105.618.000	97,98		
	Pelatihan pelayanan klaster pengendalian penyakit			358.010.900		327.515.174	91,48		
	Pelatihan Manajemen			148.800.000		145.600.000	97,85		
	Workshop kader Kesehatan			346.130.000		340.703.289	98,43		
	Workshop pelayanan klaster Ibu Hamil, Balita dan Remaja			52.700.000		50.300.000	95,45		
	Workshop pelayanan klaster Usia Produktif dan Lansia			136.350.000		134.843.289	98,89		
	Pelatihan Kader Posyandu dan Posyandu Prima			157.080.000		155.560.000	99,03		
II	BPOM	10	Puskesmas	429.440.000		389.156.000	90,62		
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik Toko Obat dan UMOT	43		82.660.000	43	65.838.000	79,65	v	8 (melalui mekanisme GU)
3	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT	80		126.885.000	80	126.845.000	99,97	v	8 (melalui mekanisme GU)
4	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	108		134.995.000	108	117.068.000	86,72	v	8 (melalui mekanisme GU)
5	peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	30		84.900.000	30	79.405.000	93,53	v	8 (melalui mekanisme GU)
	TOTAL			4.983.529.900		4.098.866.495	82,25		

Realisasi keuangan dana BOK TA 2023 sebesar 82.25%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar 70.72%, dari anggaran Rp. 4.983.529.900,- yang terealisasi 4.098.866.495,- atau sebesar 82.25% dari pagu. Hal ini disebabkan beberapa hal:

1. Kegiatan pengadaan obat dan BMHP yang tidak tersedia oleh penyedia

2. Transportasi rujukan pelayanan ibu melahirkan disebabkan karena kesalahan dalam penginputan kode rekening belanja yang seharusnya di belanja perjalanan dalam kota terinput di perjalanan biasa.
3. Perubahan juknis DAK Non Fisik dimana pengadaan kartrid TCM di alihkan ke kegiatan survei akreditasi dan sisa anggaran pengadaan kartrid TCM tidak dapat di pergunakan untuk kegiatan yang lainnya.

Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Secara umum permasalahan yang terjadi di dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan kami rinci sebagai berikut :

No.	Subbidang	Permasalahan
DAK FISIK		
1.	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	• Tidak ada permasalahan
2.	Sub Bidang pengendalian penyakit	• Tidak ada permasalahan
DAK NON FISIK		
1.	BOK	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi rujukan pelayanan ibu melahirkan disebabkan karena kesalahan dalam penginputan kode rekening belanja yang seharusnya di belanja perjalanan dalam kota terinput di perjalanan biasa. • Perubahan juknis DAK Non Fisik dimana pengadaan kartrid TCM di alihkan ke kegiatan survei akreditasi dan sisa anggaran pengadaan kartrid TCM tidak dapat di pergunakan untuk kegiatan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Perencanaan Strategis menuju Dumai Sehat 2023, Dinas Kesehatan telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan kesehatan Kota Dumai dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Dinas Kesehatan telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan itu sendiri adalah proses yang panjang dan bersifat investasi, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat sehat, kreatif dan produktif dalam lingkungan dan perilaku sehat, seperti yang tertuang dalam Visi Dumai Sehat 2023. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan akan selalu membutuhkan perhatian besar dari seluruh kalangan, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kota Dumai ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

Dumai, 20 Januari 2023
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI**

Dr. SYAIFUL. MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710724 200112 1 004